

# MENYEMAI NILAI-NILAI INKLUSIF-TOLERAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA<sup>1</sup>

Dr. Hujair AH. Sanaky MSI<sup>2</sup>

## I PENDAHULUAN

Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang relegius. Indonesia merupakan bangsa multikultural, dihuni oleh beragam ras, etnis, budaya dan agama. Keragaman yang bersifat natural dan kodrati ini akan menjadi suatu manifestasi yang berharga ketika diarahkan dengan tepat menuju situasi dan keadaan yang kondusif. Namun, sebaliknya, ketika tidak diarahkan dengan pola yang tepat, keragaman ini akan menimbulkan benturan peradaban (*clash of civilization*), sering menghasilkan situasi konflik berdarah, yang menciptakan perpecahan dan disintegrasi sosial.

Dengan keragaman ras, etnis, budaya, dan agama, diperlukan pendidikan yang harus mampu memberikan gambaran dan idealitas moral agamanya secara kontekstual. Dalam proses pendidikan diperlukan peninjauan ulang terhadap doktrin-doktrin agama yang “kaku” dan kurang humanis selama ini dilaksanakan. Pluralitas agama dan keyakinan tidak lagi dipahami sebagai potensi kerusuhan, melainkan menjadi potensi untuk diajak bersama melaksanakan ajaran demi kepentingan kemanusiaan. Dengan demikian, seluruh agama harus mengklaim membangun peradaban (*civilization*), perdamaian dan keselamatan manusia.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini atau tepatnya setelah bergulirnya reformasi pada 1998, yang berimbas pada jatuhnya rezim Orde Baru, lembaga pendidikan berbasis agama kian tumbuh subur. Seolah-olah tak mau ketinggalan, sekolah-sekolah umum (negeri) bahkan turut berpacu mencitrakan diri sebagai lembaga pendidikan yang *religious*.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Seminar Nasional “Pendidikan agama yang Inklusif dalam Menangkal Radikalisme Agama di Perguruan Tinggi”. Diselenggarakan oleh Prodi PAI FIAI UII bekerjasama dengan HMJ PAI UII, bertempat di ruang auditorium gedung Perpustakaan Pusat UII tanggal 9 Oktober 2017.

<sup>2</sup> Hujair AH. Sanaky, Dr. MSI, adalah Direktur Program Pascasarjana FIAI UII dan dosen tetap pada Prodi PAI FIAI UII.

Tepatnya lebih islami. Bahkan, belakangan ini, sekolah negeri, jauh terlihat agamis ketimbang sekolah “berbasis agama” seperti madrasah dan pesantren. Sekolah-sekolah negeri juga dilengkapi dengan “fasilitas keagamaan”, yang seakan-akan menjadi “ciri khas sekolah” tersebut yang terlihat seperti sekolah agamis.

Hal serupa juga terjadi pada level perguruan tinggi. Seperti menguatnya kegiatan keagamaan di sejumlah kampus di berbagai daerah. Saat ini kampus sudah didukung oleh berbagai fasilitas keagamaan yang semakin lengkap. Jika beberapa tahun yang lalu, sekitar 1980-an sejumlah kampus di Jogja belum dilengkapi masjid--kecuali kampus-kampus Islam--tetapi sekarang hampir di semua kampus sudah mempunyai masjid atau setidaknya mushalla. Sebut saja misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak kampus-kampus besar yang kerap menggelar kegiatan keagamaan seperti *halaqah*, pengajian, kursus Islam, dan sebagainya. Bahkan bila memasuki bulan Ramadhan, kegiatan keagamaan di sejumlah kampus itu semakin menunjukkan aktivitas keagamaan yang cukup semarak dan meriah.

Pada satu sisi, menguatnya kegiatan keagamaan di lembaga pendidikan sekolah ataupun di sejumlah kampus khususnya yang digerakkan melalui lembaga masjid sangat positif dan perlu didukung oleh semua pihak. Namun pada sisi lain, menguatnya kegiatan tersebut semakin hari justru semakin menunjukkan kecenderungan yang mengarah pada apa yang dikenal sebagai “eksklusivisme keagamaan”. Statemen di atas bukan tanpa dasar.

Survei yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta menguatkan pernyataan tersebut. Menurut survey yang dilakukan tahun 2010/2011 terhadap guru PAI dan murid SMP dan SMA di Jabodetabek ini menunjukkan sebanyak 62,4 persen guru agama--termasuk dari kalangan NU dan Muhammadiyah, menolak untuk mengangkat pemimpin non-muslim. 68.6 persen guru agama menentang diangkatnya orang non-muslim sebagai kepala sekolah mereka.

Presentase guru agama yang menolak kehadiran rumah ibadah non muslim di lingkungan mereka cukup besar, yakni 73, 1 persen. Sedangkan ada 85.6 persen guru agama yang melarang murid mereka untuk ikut merayakan apa yang dipersepsikan sebagai “tradisi Barat”. Demikian pula terdapat 87 persen yang menganjurkan muridnya tidak mempelajari agama-agama lain dan 48 persen lainnya lebih menyukai pemisahan laki-laki dan

perempuan dalam kelas yang berbeda. 75,4 persen dari responden yang meminta agar murid-murid mereka mengajak guru-guru non-muslim untuk masuk Islam, sementara 61,1 persen menolak sekte baru dalam Islam. Sebanyak 67,4 persen responden yang lebih merasa sebagai muslim ketimbang sebagai orang Indonesia.<sup>3</sup>

Lebih dari itu, mayoritas responden juga mendukung penerapan syariah Islam untuk mengurangi angka kriminalitas: 58,9 persen mendukung hukum rajam dan 47,5 persen mendukung hukum potong tangan untuk pencuri serta 21,3 persen setuju hukuman mati bagi orang murtad dari agama Islam.<sup>4</sup> Di Jogja sendiri yang selama ini dikenal *the city of tolerance*, sekaligus menjadi barometer toleransi Indonesia, pun tidak luput dari gejala intoleransi serta eksklusifisme keagamaan. Hasil riset Yayasan LKIS, terkait gejala intoleransi di kalangan pelajar SMU Negeri di Yogyakarta ini menarik untuk ditampilkan. Dari 760 responden dari 20 SMU di DIY menunjukkan bahwa 6,4% memiliki pandangan yang rendah dalam hal toleransi, 69,2% memiliki pandangan yang sedang, dan hanya 24,3% yang memiliki pandangan tinggi. Sementara dalam hal tindakan; 31,6% dari total responden memiliki tingkat toleransi beragama yang rendah, 68,2% memiliki tingkat toleransi sedang, dan hanya 0,3% dapat dikategorikan memiliki tingkat toleransi yang tinggi.<sup>5</sup>

Fakta ini tentu saja memunculkan pertanyaan, mengapa semakin baik tingkat **pendidikan keagamaan masyarakat**, justru mengarah kepada **sikap eksklusif** dan **intoleran beragama**? Bukankah pendidikan, termasuk pendidikan agama berperan menumbuhkan nilai positif manusia tentang kecerdasan, daya kreatif, dan keluhuran budi, sehingga dalam diri manusia tidak berkembang sifat negatif; jiwa beku, sikap intoleran, sikap mau benar sendiri, perilaku kekerasan, dan gampang sekali menilai orang lain sesat; atau adakah yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan keagamaan di sekolah ataupun di perguruan tinggi, sehingga rentetan insiden bernuansa SARA terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya, dan cenderung terjadi merata di berbagai

---

<sup>3</sup> Survei yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2010-2011, terhadap guru PAI dan murid SMP dan SMA di Jabodetabek.

<sup>4</sup> Dalam [www.bbc.com/Indonesia/berita\\_indonesia/2011/04/110426\\_surveiradikalisme](http://www.bbc.com/Indonesia/berita_indonesia/2011/04/110426_surveiradikalisme)

<sup>5</sup> Hairus Salim HS, *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta*, (Jogjakarta: CRCS, 2011), hlm. 29-30

daerah. Bukankah setiap agama menjunjung tinggi perdamaian dan mengklaim sebagai rahmat bagi semesta?

Jadi, tidak sedikit yang melihat bahwa kecenderungan sikap keberagamaan masyarakat yang intoleran dewasa ini, secara umum bahkan di Indonesia, dipengaruhi oleh pendidikan di masyarakat, khususnya pendidikan agama yang diajarkan di sekolah tinggi yang cenderung eksklusif. Selain itu, masing-masing pemeluk agama **mengklaim** agamanya **paling benar**, dibandingkan dengan agama lainnya. Sikap ini tentu saja mengabaikan kebenaran yang berada di agama lain, diluar agamanya. Ini adalah “sikap menutup diri” dari pandangan lain yang juga turut mengembangkan sikap keberagamaan masyarakat yang intoleran. Tetapi disisi lain ada kekhawatiran klaim seperti ini jelas-jelas akan mengaburkan ajaran Islam.

## II

### NILAI-NILAI INKLUSIF DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Inklusifitas agama belakangan ini menjadi isu sentral dalam mengembangkan teologi. Munculnya isu ini disebabkan karena semakin kaburnya kesadaran masyarakat tentang pluralitas yang meniscayakan multi etnik dan multi agama yang tumbuh dalam masyarakat yang berbhineka. Pada saat ini, toleransi etnik dan agama di Indonesia menjadi agenda penting sejak maraknya kekerasan etnik agama, serta gencarnya kasus-kasus teror yang ditebar atas nama agama.

Agama, sebagaimana kita ketahui, lebih banyak berhubungan dengan hati (iman) ketimbang rasio. Maka agama mengandung dimensi subjektivitas, dalam arti pengalaman keagamaan per-individu, yang sulit ditelusuri. Sedangkan pada pendekatan normatif adalah upaya untuk menjelaskan sebuah agama dengan menitikberatkan kebenaran doktrinal dan keunggulan sistem nilai. Pendekatan ini akan menggunakan cara-cara yang bersifat persuasif apologetik dalam mempertahankan keunggulannya. Disinilah terjadi dalam membandingkan suatu agama dengan agama lain, dengan penekanan unsur-unsur “kelemahan dan kekurangan” selalu ditonjolkan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Alwi shihab, *Islam Inklusif menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Cet.IV, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 46.

Berangkat dari realitas di atas, banyak gagasan untuk menafsirkan agama (Islam) dikaitkan dengan corak kehidupan di Indonesia yang beragam. Beberapa di antaranya mencoba menawarkan apa yang disebut sebagai “Islam inklusif” yang secara umum diartikan dengan Islam yang terbuka, artinya mengakui adanya nilai kebenaran pada agama lain demi kerukunan, kedamaian umat. Namun perlu dicatat, pengakuan atas kebenaran agama lain tidak berarti mencampuradukkan paham-paham agama lain bercampur dengan Islam. “Islam inklusif” berupaya mengambil universalitas Islam sebagai agama yang *rahmatan lil’alamin* yang terimplemntasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat ajarannya yang inklusif diharapkan ajaran Islam mampu menjawab isu-isu global seperti humanisme, pluralisme, gender dan sebagainya.

Katakan saja, ada dua istilah yang perlu dicermati yaitu inklusif dan eksklusif. **Inklusif** mengidentifikasikan sebagai sikap terbuka, toleran dan mau menerima orang lain. Sementara **eksklusif** adalah sikap tertutup, jumud dan rigit. Katakan saja, inklusifisme berusaha menggapai kesatuan agama-agama lain. Tentu saja, berbeda dengan **eksklusifisme** yang berusaha untuk menjadikan agama-agama yang banyak itu sebagai salah satu **facet (segi)** dari agama yang satu. Maka berkembanglah apa yang sering disebut sebagai **inklusif pluralis** dan **inklusif teologiis**.<sup>7</sup>

Inklusif agama belakangan ini menjadi isu sentral dalam mengembangkan teologi. Munculnya isu ini disebabkan karena semakin kaburnya kesadaran masyarakat tentang pluralitas yang meniscayakan multi etnik dan multi agama yang tumbuh dalam masyarakat yang berbhineka. Pada saat ini, toleransi etnik dan agama di Indonesia menjadi agenda penting sejak maraknya kekerasan etnik agama, serta gencarnya kasus-kasus teror yang ditebar atas nama agama.

Dalam konsep “Islam inklusif” itu sendiri, meminjam istilahnya Alwi Shihab<sup>8</sup> harus dibangun dengan landasan satu pemahaman mengenai perbedaan yang merupakan *sunnatullah*, mengandung semangat pluralisme agama dan toleransi. Sedangkan upaya untuk mewujudkan itu dengan melakukan studi perbandingan agama, dan dialog antar agama untuk

---

<sup>7</sup> Baca: Wahyudi, “Islam Inklusif; Skeptisitas atas Doktrin Agama”, <http://almuflihun.com/islam-inklusif-skeptisitas-atas-doktrin-agama/>, diakses pada Rabu, 4 Oktober 2017, jam. 13.55 WIB.

<sup>8</sup> Alwi shihab, *Islam Inklusif menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 47.

mencari *kalimath sawa*<sup>9</sup> (titik temu) dengan agama lain. Jika dikaitkan dengan pendidikan perlu adanya kesadaran lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi untuk lebih menanamkan nilai-nilai terbuka, tidak benar sendiri, saling menyalahkan. Nilai-nilai tersebut bisa diadaptasi dengan pemikiran Islam inklusif.

Mengadaptasikan nilai-nilai inklusif ini penting diupayakan mengingat bahwa sikap keberagaman masyarakat yang intoleran ini, secara umum bahkan di Indonesia, dipengaruhi oleh pendidikan di masyarakat, khususnya pendidikan agama yang diajarkan di sekolah/perguruan tinggi yang cenderung eksklusif. Memang dunia pendidikan bukanlah satu-satunya institusi yang harus bertanggung jawab, namun tidak bisa dinapikan bahwa dunia pendidikan memiliki andil yang signifikan untuk dua proses kecenderungan; menoleransi keragaman atau sebaliknya, menjadikan keragaman sebagai bagian dari sumber kekerasan, karena pendidikan menjadi institusi yang menanamkan nilai-nilai di dalam manusia Indonesia. Katakan saja, kecenderungan pendidikan yang intoleran, bervisi eksklusif, menafikan realitas kebangsaan Pancasila, akan mudah menjadi pemantik bagi kecenderungan kekerasan berbasiskan keyakinan yang eksklusif. Dengan begitu akan memunculkan suatu pembelajaran yang mengutamakan kebenaran bersama dan tidak mengunggulkan satu golongan tertentu. Selain itu memberikan pembelajaran pada siswa bahwa sebagai makhluk sosial terlebih di Indonesia yang majemuk ini tidak bisa seenaknya memaki-maki dan menghakimi sesat kepada mereka yang beragama berbeda.<sup>10</sup>

Kegagalan dalam menumbuhkan kembangkan sikap toleran dan inklusif dalam pendidikan agama hanya akan melahirkan sayap radikal dalam beragama. Meminjam filsafat pendidikan Paulo Freire, sudah saatnya pendidikan agama diarahkan pada arena pembebasan dari belenggu doktrin-

---

<sup>9</sup> Nurchalish Madjid memaknai *kalimah sawa*’ adalah kalimat, idea atau prinsip yang sama., yaitu ajaran bersamayang menjadi “*common platform*” antara berbagai kelompok manusia. Dalam kitab suci Quran,, allah memerintahkan agar Nabi Muhammad, rasul-Nya, mengajak komunitas keagamaan lain, khususnya para ahlul kitab untuk bersatu dalam titik pertemuan tersebut. Lebih rinci lihat nurcholish Madjid, *Islam, doktrin dan Peradaban*, cet. Ke. 3, (Jakarta; Paramadina, 1995), hlm. 7-8.

<sup>10</sup> Salah satu faktor utama penyebab terjadinya konflik keagamaan di Indonesia karena paradigm keagamaan masyarakat yang masih eksklusif. Pemahaman keagamaan eksklusif ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena dapat membentuk pribadi yang antipasti terhadap pemeluk agama lainnya. Dan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural ini, pemahaman demikian tentu akan mudah memicu konflik berbasis SARA. Lihat: M.Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultur Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 56-57.

doktrin agama yang eksklusif dan intoleran menuju formulasi pendidikan agama yang inklusif. Karena sejak awal pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakkan budaya yang serba eksklusif.<sup>11</sup>

### III

#### PROBLEM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI INKLUSIF

Upaya untuk mengadaptasikan nilai-nilai inklusif dalam pendidikan agama sesungguhnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Seperti tertuang dalam UU Sisdiknas yang salah satu pasalnya mengharuskan setiap lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK sederajat) mengajarkan pendidikan agama yang sesuai dengan kepercayaan peserta didik. Salah satu mata pelajaran pendidikan agama di lembaga pendidikan tersebut yaitu PAI.

Oleh sebabnya PAI juga seharusnya menanamkan sikap-sikap terbuka, toleran dan moderat pada peserta didik. Tahun 2016, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama pun meluncurkan kurikulum pendidikan Islam *rahmatan lil'alam* yang kehadirannya sebenarnya telah ditunggu sejak lama oleh banyak pihak. Kurikulum baru yang sedang diujicobakan di sebagian sekolah dan madrasah tersebut menekankan pemahaman Islam yang damai, toleran, dan moderat. Hasilnya, diharapkan mampu berkontribusi mencegah pemahaman keagamaan yang ekstrim atau radikal.<sup>12</sup>

Sayangnya pada tataran implementatifnya, kurikulum pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah termasuk di perguruan tinggi, terbukti tidak cukup mampu melahirkan peserta didik yang toleran, inklusif dan moderat seperti yang dicitakan undang-undang. Justru sebaliknya pendidikan agama yang diajarkan di sekolah selama ini melahirkan individu-individu yang sempit, yang hanya mau menerima kebenaran moral dari agamanya; menjadikan agamanya sebagai patokan tertinggi kebenaran dan pada gilirannya tidak mau menerima dimensi-dimensi kebenaran dari agama lain. Pendidikan agama, meminjam istilah Imron Rosyidi tidak mampu

---

<sup>11</sup> Lihat: <http://liputanislam.com/kajian-islam/telaah/pendidikan-agama-inklusif/>

<sup>12</sup> Dalam Suhadi Khalil, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pendidikan-agama-monoreligius-inklusif>

bergeser dari pengetahuan kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang diinternalisasikan dalam diri peserta didik untuk selanjutnya sebagai sumber motivasi bagi peserta didik untuk bergerak, berbuat dan berperilaku secara kongkrit, religius, dan toleran dalam kehidupan praksis sehari-hari.<sup>13</sup>

Tentunya titik lemah pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini bisa terus diungkap dalam berbagai aspeknya. Sebut saja misalkan rumusan kurikulumnya yang belum mengarah pada pembentukan peserta didik yang toleran-inklusif. Tidak bisa dinapikan salah satu ajaran pendidikan agama di sekolah masih saja mengajarkan *claim of truth* sehingga menapikan kebenaran agama lain. Pada level materi; implementasi pendidikan agama, jika dilihat dari segi materi, belum sepenuhnya mencerminkan visi penghargaan terhadap perdamaian dan penghargaan terhadap agama lain. Isi buku ajar (khususnya agama Islam) cenderung membentuk pribadi peserta yang saleh secara individual (ritual) dan belum membentuk pribadi yang saleh secara sosial apa lagi kebangsaan.

Pada level guru/dosen, selain masih dianggap belum memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran juga miskin metode pembelajaran. metode pengajarannya yang masih indoktrinasi, media pembelajaran yang masih jauh dari konten toleransi sampai evaluasi pembelajaran yang masih didasarkan pada kognitif dan psikomotorik dan belum menyentuh pada aspek afektif peserta didik. Sehingga proses pembelajaran agama tidak berjalan baik dan efektif sesuai tujuan pendidikan yang dirumuskan.

#### IV

#### **PROBLEM MINDSET GURU, DAN MINIM METODE PEMBELAJARAN**

Tentunya kita semua sepakat bahwa pendidikan agama perlu dibenahi dan dibongkar secara total dari berbagai aspeknya atau dengan kata lain dilakukan deradikalisasi pendidikan agama/keagamaan. Filosofi pendidikan agama yang hanya membenarkan agamanya sendiri, tanpa bersedia menerima kebenaran agama lain perlu dikritisi untuk selanjutnya dilakukan

---

<sup>13</sup> Imron Rosyidi, *Pendidikan Berparadigma Inklusif: Upaya Memadukan Pengokohan Akidah Dengan Pengembangan Sikap Toleransi dan Kerukunan* (Malang: UIN Malang Press, 2009) hlm. 51

reorientasi. Materi pembelajaran agama yang terjebak pada *truth of claim*, iman-kafir, muslim non-muslim yang sangat berpengaruh pada cara pandang masyarakat pada agama lain perlu di hapus dalam pandangan peserta didik untuk selanjutnya dikontekstualisasi dengan berbagai isu global seperti HAM, Demokrasi *climate change*, dan lain-lain. Dengan begitu tidak akan membentuk cara bernalar yang absurd bagi umat beragama.

Di samping ajaran normatif, mestinya doktrin keagamaan yang dikembangkan adalah wacana-wacana kemanusiaan dan aspek keilmuannya, bukan mistifikasi teks-teks keagamaan. Sebuah cara berpikir yang partikularistik dan ritualistik sehingga nilai-nilai agama tidak berperan sebagai citra atau etos kemanusiaan dan *blueprint* perkembangan peradaban.<sup>14</sup> Masalahnya sekarang tentu harus ada prioritas dari aspek mana pembenahan tersebut harus dimulai.

Solusi yang kerap dimunculkan sering dimulai pada aspek kurikulum; redesign kurikulum pendidikan agama yang berperspektif inklusif dan pluralis. Menitikberatkan lewat pembenahan kurikulum tentu tidaklah salah. Karena kurikulum sebagaimana dikemukakan Nana Syaodih Sukmadinata<sup>15</sup> mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Selain itu kurikulum juga suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup urutan isi dan proses pendidikan. Kurikulum bukan sekadar rencana tertulis bagi pengajaran tetapi juga sesuatu yang fungsional yang beroperasi dalam kelas, yang memberi pedoman dan mengatur lingkungan dan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Usaha-usaha pembenahan dalam aspek kurikulum sering dipandang sebagai upaya mendesak yang harus dilakukan.

Dalam pandangan penulis, redesign kurikulum sebagai solusi yang mendesak dilakukan, tidak akan efektif, tanpa membenahi dua aspek: pertama perspektif keagamaan guru/dosen dan kedua pengayaan metode pembelajarannya. Dalam berbagai kesempatan sering penulis menyatakan pandangan senada bahwa redesign kurikulum dalam konteks pendidikan keagamaan di Indonesia tidak efektif membentuk pribadi toleran tanpa terlebih dahulu membenahi dari kedua aspek ini. Guru/dosen yang

---

<sup>14</sup> Marshall G. S. Hodgson, *Rethinking World History: Essays on Europe, Islam and World ...* (Chicago: The University of Chicago Press, 1974) hlm. 83 .

<sup>15</sup> Lihat: [https://www.academia.edu/8745022/Pengembangan Kurikulum dalam \\_teori\\_ dan\\_ praktik.](https://www.academia.edu/8745022/Pengembangan_Kurikulum_dalam_teoridan_praktik)

notabene selaku pelaksana dan perancang pengajaran, keberadaannya jelas menjadi ujung tombak penyampai pesan-pesan kurikulum. Sayangnya kedua aspek, justru nyaris tidak tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu toleransi, pluralisme dan dialog antar agama.<sup>16</sup>

## V

### **MINDSET PENDIDIK YANG BERMASALAH**

Bagaimana mungkin pendidikan agama yang inklusif-toleran dapat terealisasi secara efektif, jika gurunya ternyata tidak memiliki perspektif yang senadan. Mereka yang berpandangan menyelesaikan persoalan intoleransi dan radikalisme harus diawali dengan mendisain ulang kurikulum telah mengandaikan selama ini kurikulum dalam proses pembelajaran sudah berperan sebagaimana mustinya. Kenyataannya, antara kurikulum dan pendidik dalam praktiknya selama ini berjalan sendiri-sendiri; seolah tidak saling berkait. Melihat realitas demikian, penulis, secara ekstrim, sampai hari ini masih meyakini, bahwa meskipun kurikulumnya didisain anti toleransi, dan anti kemajemukan sekalipun, tetapi jika dijalankan oleh guru yang berpandangan inklusif, pesan-pesan yang disampaikan akan inklusif pula dan begitu pula sebaliknya.

Dalam konteks ini penulis memiliki pengalaman empirik-faktual. Saat duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) terdapat pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (sekarang menjadi Pendidikan kewarganegaraan). Dalam mata pelajaran tersebut diajarkan tentang kerukunan umat beragama. Meskipun pesan yang hendak disampaikan adalah tentang kerukunan antar umat beragama, bahkan dalam buku yang menjadi pegangan siswa saat itu, secara jelas digambarkan kelima rumah ibadah (Masjid, Gereja, Vihara dan sebagainya), dan ditempatkan secara berdampingan yang tentunya dimaksudkan memberikan pesan kerukunan terhadap para peserta didik.

Akan tetapi karena diampu oleh guru yang eksklusif justru pesan-pesan kerukunan tersebut tidak tersampaikan sama sekali. Yang terjadi justru guru tersebut mengajarkan berdasarkan subyektifitas keyakinannya dengan menyebut agama tertentu yang dia anut sebagai agama yang benar

---

<sup>16</sup> Lihat Amin Abdullah, *Normativitas dan Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 51

seangkan yang lainnya salah. Karenanya saya berpandangan, fenomena menguatnya intoleransi ini yang terus marak, tidak bisa dilepaskan dari kontribusi para guru agamanya. Survei yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) UIN Syarif Hidayatullah, seperti dijelaskan di muka, menunjukkan betapa *mindset* keagamaan guru menjadi permasalahan yang tidak sederhana di atasi.

Membaca hasil riset tersebut, sangat kecil kemungkinan mereka ini akan merujuk pada pedoman kurikulum yang tersedia. Yang terjadi, mereka akan meletakkan panduan kurikulum dalam laci meja bahkan bila perlu menguncinya, selanjutnya mengajarkan materi pelajaran sesuai dengan subyektifitas keyakinan mereka. Ada kecenderungan menguatnya sikap keberagaman yang eksklusif justru diperoleh dari interaksi peserta didik dengan gurunya dalam pembelajaran di kelas atau interaksi mereka di lingkungan sekolah. Dengan kata lain, terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara pandangan eksklusif para guru agama dengan perilaku keagamaan peserta didiknya.

Paham-paham keagamaan para guru lebih terefleksikan dalam pelajaran mereka dan berkontribusi menumbuhkan konservatisme dan radikalisme agama di masyarakat, khususnya di kalangan muda. Karenanya penulis berpandangan, berbagai upaya deradikalisasi pendidikan agama tidak akan bermakna signifikan atau bahkan sia-sia, jika tidak diimbangi dengan kesiapan guru agama (selaku pelaksana dan perancang pengajaran), pada aspek paradigma keagamaanya. maupun metode pengajarannya; dari doktrinasi menuju dialogis. Sayangnya sebagaimana dikemukakan di atas, aspek guru nyaris tidak diperhatikan sebagai persoalan yang mendesak dibenahi.

## VI

### **PROBLEM METODE PEMBELAJARAN**

Metode Pembelajaran adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran adalah rencana penyajian bahan yang menyeluruh dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Artinya, pembelajaran didasarkan pada *learning competency*, yaitu peserta didik akan memiliki seperangkat

pengetahuan, keterampilan, sikap, wawasan dan penerapannya sesuai dengan criteria atau tujuan pembelajaran. Penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian berkarya, sikap dan perilaku berkarya dan cara-cara berkehidupan di masyarakat sesuai profesinya. Dengan demikian, proses belajar harus diorientasikan pada pengembangan kepribadian secara optimal dan didasarkan nilai-nilai *ilahiyyah*.<sup>17</sup>

Metodolgi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai.<sup>18</sup> Metode pembelajaran berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai. Katakan saja, seseorang guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan dengan tujuan agar siswanya mendapat suatu pengetahuan yang bersifat kognitif, akan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dengan orang lain atau dirinya sendiri ketika mengajar mata pelajaran yang bertujuan agar siswanya mampu mengubah sikap tertentu.

Penggunaan metode mengajar yang kurang tepat akan mengakibatkan dampak yang kurang optimal terhadap hasil belajar siswanya. Proses pembelajaran yang tidak efektif merupakan faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa.<sup>19</sup> Oleh sebabnya, agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan, maka perlu, mempelajari beberapa metode mengajar, serta dipraktekkan pada saat mengajar. Permasalahannya, selain mindset keagamaan guru, yang masih “bermasalah”, para guru penguasaan guru pada metode pembelajaran masih sangat minim. Dalam berbagai forum seminar. Workshop bersama guru, yang pernah penulis ikuti, metode pembelajarannya masih konvensional yaitu metode ceramah yang berorientasi kognitif. Hal tersebut sulit diubah meskipun kurikulum sudah berkali-kali diganti namun metode ini masih dominan digunakan. Pernyataan ini tidak berarti penulis anti dengan metode ceramah, semua metode terdapat plus minusnya.

Proses pembelajaran yg baik memiliki makna membantu siswa dapat belajar dengan baik. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, baik sesuai dgn

---

<sup>17</sup> Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm.191.

<sup>18</sup> Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003), hlm. 102.

<sup>19</sup> Dalam [https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPTM/article/...](https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPTM/article/)

karakteristik siswa maupun karakteristik mata pelajaran/pokok bahasannya, serta kemampuan guru sendiri. Tidak ada satu metode mengajar yg cocok untuk semua guru, semua siswa & semua pokok bahasan yg akan diajarkan. Karena sesungguhnya **“tidak ada satu obat yang mujarab utk semua jenis penyakit”**. Demikian juga dengan metode mengajar. Maka kemampuan guru menguasai serta menggunakan berbagai metode tersebut secara tepat mutlak diperlukan hari ini.

Dalam konteks ini, pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah suatu upaya untuk membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama Islam, baik untuk mengetahui bagaimana cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan.<sup>20</sup>

Persoalan yang dihadapi adalah bila proses pembelajaran pendidikan agama yang “salah”, dapat menjadikan seseorang “menjadi radikal”. Katakan saja, di banyak sekolah, siswa bukannya diperkenalkan dengan ajaran agama yang “penuh cinta damai”, namun justru dikenalkan dengan ajaran yang keras, agresor, dan pembalas dendam. Selain itu, juga didukung dengan kurikulum pendidikan agama yang lebih berorientasi pada hukum/fikih yang kaku, dan eksklusif, bukannya pada cinta yang moderat dan inklusif. Padahal Islam adalah ajaran yang sangat berorientasi pada ajaran cinta yang *rahmatan lil alamin*.

Untuk mencegah lahirnya radikalisme ini, perlu merombak total cara pandang terhadap agama Islam. Cara mengajarkan pelajaran agama kepada para murid. Di sinilah peran guru/dosen sebagai pendidik menduduki posisi kunci. Sebab di tangan para guru/dosen lah, anak didik dapat dibentuk cara pandangannya terhadap agama dengan kacamata *rahmatan lil alamin*.

Maka, dalam “menyemai” nilai-nilai agama yang inklusif di kelas, proses pendidikan agama harus moderat, ini agama cinta kasih. Jadilah figur pendidik yang modal utamanya adalah kasih sayang kepada siswa. Ajarkan bahwa Islam itu adalah agama kasih sayang Allah Swt sebagai *rahmatan lil alamin*. Kita ingin membentuk dan mengajarkan anak didik bahwa agama Islam itu ajaran yang penuh rahmah dan kasih sayang. Ini sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikal dalam agama.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana para guru/dosen menggunakan metode-metode pembelajaran untuk “menyemai” (menanam-

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm. 91.

menaburkan benih) nilai-nilai agama yang inklusif di kelas. Bagaimana menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, mengajar secara interaktif, melibatkan orang tua dalam proses perencanaan, menerapkan kurikulum yang multilevel, dan bekerja secara tim.

Sapon-Sevin dalam Sunardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wasita, menyebutkan ada lima profil pembelajaran inklusif, yaitu: (a) Pembelajaran inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. (b) Pembelajaran inklusi berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multi modalitas. (c) Pembelajaran inklusi berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode pembelajaran. Model kelas tradisional yang menempatkan satu atau seorang guru yang berjuang secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan semua anak harus diganti dengan model pembelajaran bersama, siswa-siswa bekerja sama, saling mengajar, dan secara aktif berpartisipasi dalam pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya. (d) Pembelajaran inklusi berarti penyediaan dorongan bagi guru/dosen dan kelasnya secara terus-menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Aspek terpenting dari pendidikan inklusi meliputi: (1) pengajaran dengan tim; (2) kolaborasi dan konsultasi; (3) berbagai cara mengukur keterampilan, pengetahuan, dan (4) bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak. (e) Pembelajaran inklusi berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan.<sup>21</sup>

## **VII PENUTUP**

Fakta-fakta intoleransi dan kekerasan mengatasmakan agama yang terjadi di masyarakat seperti dijelaskan di atas, menunjukkan pada kita tidak mudah menghapus keyakinan-keyakinan dengan simbol agama untuk melakukan kekerasan. Maka intoleransi, kekerasan bernuansa agama perlu dicarikan pemecahannya secara mendasar dengan mempertimbangkan sebab-sebab, kelemahan-kelemahan konsep apa yang sudah dilakukan selama ini, dan bagaimana gagasan-gagasan baru untuk memberi solusi yang

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 80-81.

lebih baik ke depan. Dengan begitu ajaran agama yang misi utamanya adalah menjadi rahmat bagi semesta dan penebar kedamaian dapat diwujudkan.

Dunia pendidikan khususnya pendidikan keagamaan di Indonesia selama ini dianggap belum mampu menjadi media penyebaran nilai-nilai inklusif-toleran di masyarakat. Padahal dalam masyarakat yang sangat majemuk seperti Indonesia, pendidikan agama harus memberikan gambaran dan idealitas moral agamanya secara kontekstual. Di sini dipersyaratkan peninjauan ulang atas doktrin-doktrin agama yang kaku. Dengan begitu pluralitas agama dan keyakinan tidak lagi dipahami sebagai potensi kerusuhan, melainkan menjadi potensi untuk diajak bersama melaksanakan ajaran demi kepentingan kemanusiaan. Karena seluruh agama selalu mengklaim demi perdamaian dan keselamatan manusia.

Oleh karena itu, pembenahan pendidikan agama menjadi mendesak dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan intoleransi yang saat ini marak terjadi. Itu semua akan bisa terwujud jika pembenahan pendidikan agama ke arah yang inklusif-toleran diimbangi dengan guru-guru agama yang inklusif serta kaya metode pembelajaran.

---

#### Daftar Pustaka

Abdullah, Amin, 2004, *Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

HS, Hairus Salim, 2011, *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta*, Jogjakarta: CRCS, 2011.

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPTM/article/...>

<http://liputanislam.com/kajian-islam/telaah/pendidikan-agama-inklusif/>

[https://www.academia.edu/8745022/Pengembangan Kurikulum dalam \\_teori\\_ dan\\_ praktik.](https://www.academia.edu/8745022/Pengembangan_Kurikulum_dalam_teoridan_praktik)

Hodgson, Marshall G. S., 1974, *Rethinking World History: Essays on Europe, Islam and World ...* Chicago: The University of Chicago Press.

Khalil, Suhadi, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pendidikan-agama-monoreligius-inklusif>.

Madjid, Nurchalish, 1995, *Islam, doktrin dan Peradaban*, Jakarta; Paramadina.

Muhaimin, 2012, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Rosdakarya.

Sanaky, Hujair AH., 2003, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Shihab, Alwi, 1998, *Islam Inklusif menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Cet.IV, Bandung: Mizan.

Slameto, 2003, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Survei yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2010-2011, terhadap guru PAI dan murid SMP dan SMA di Jabodetabek.

Rosyidi, Imron, 2009, *Pendidikan Berparadigma Inklusif: Upaya Memadukan Pengokohan Akidah Dengan Pengembangan Sikap Toleransi dan Kerukunan*, Malang: UIN Malang Press.

Yaqin, M. Ainul, 2005, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultur Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Wahyudi, "Islam Inklusif; Skeptisitas atas Doktrin Agama", <http://almuflihun.com/islam-inklusif-skeptisitas-atas-doktrin-agama/>, diakses pada Rabu, 4 Oktober 2017, jam. 13.55 WIB.

[www. bbc.com/Indonesia/berita indonesia /2011/04/ 110426\\_ surveiradikalisme](http://www.bbc.com/Indonesia/berita_indonesia_/2011/04/110426_surveiradikalisme)